



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR                   TAHUN  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN LAPORHENDI

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Semarang telah memiliki saluran pengaduan pelayanan publik melalui LaporanHendi;  
b. bahwa dalam rangka penanganan pengaduan pelayanan publik Kota Semarang yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan LaporanHendi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan LaporanHendi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propensi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta / (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

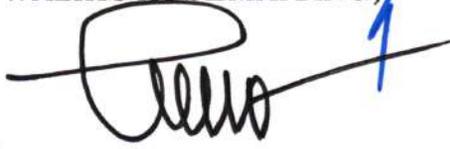
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-KabupatenTingkat II Purbalingga, Cilacap,Wonogiri,Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, TambahanLembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 34);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan LaporHendi.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :  
a. Tim Pengelolaan Pengaduan Laporhendi Kota Semarang;  
b. Admin Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M);  
dan  
c. Pejabat Penghubung LaporHendi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan Susunan Keanggotaan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

✓ WALIKOTA SEMARANG,  
  
HENDRAR PRIHADI  
r

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang; dan
10. Anggota Tim Pengelolaan Pengaduan LaporHendi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR                      TAHUN  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
PENGADUAN LAPORHENDI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN LAPORHENDI

A. Tim Pengelolaan Pengaduan LapoHendi Kota Semarang

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Pembina
2.	Wakil Walikota Semarang	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Ketua
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Wakil Ketua
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Sekretaris
7.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Anggota
8.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota

B. Admin Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Agung Budiono, Amd	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Admin P3M
2.	Dicky Proklamanto P	Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Operator P3M
3.	Febry Riswati	Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Operator P3M



4.	Beniditta Yuni S	Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Operator P3M
5.	Bella Rarantica	Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Operator P3M

C. Pejabat Penghubung LaporanHendi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eko Fredy Setiawan	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
2.	Sastrawati, SKM, Msi	Pengolah Data pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
3.	Adityo G Pratidina, SS	Penyusun Program dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Pejabat Penghubung
4.	Maskan, SE	Operator Komputer pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Pejabat Penghubung
5.	Tri Rahmawati, A.Md	Pranata Komputer pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Pejabat Penghubung
6.	Puji Riady, ST.,M.Han	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Pejabat Penghubung
7.	Eko Sri A, SH, M.M.	Kasie Pengaduan pada Satpol PP Kota Semarang	Pejabat Penghubung
8.	Adhitya K C, M.PPS,	Petugas Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Pejabat Penghubung
9.	M. Syauqi	Staf Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Pejabat Penghubung

1	2	3	4
10.	Taufik Abdul R,SE	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Pejabat Penghubung
11.	Sumardi, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
12.	Agus Sumartono, ST	Tenaga Teknis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Pejabat Penghubung
13.	Estarika Dyah Kartikasari, A.Md.Kom	Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Pejabat Penghubung
14.	Achmad Oktaris Sediatmoko, SE,MM,MSI	Kasi Bina Ketahanan Remaja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Pejabat Penghubung
15.	Widodo, A.Md	Staff Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
16.	Ratri Nugrahaning W, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Pejabat Penghubung
17.	Pramastuti M,S.Ip	Kasi Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang	Pejabat Penghubung
18.	Catur Tri Gangga, A.Md	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Pejabat Penghubung
19.	Hadi Susanto, SS	Analisis Informasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Pejabat Penghubung

f k d k

1	2	3	4
20.	Dadang Widarso,SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
21.	Lusy Ameilyana,S.Pi,MSi	Penyusun Program dan Evaluasi pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
22.	Artha Cahyo, K, STP	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Pejabat Penghubung
23.	Agus Riyanto, SE.	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
24.	Anton Brahmanto, ST	Analisis Standarisasi dan Teknologi pada Dinas Perindustrian Kota Semarang	Pejabat Penghubung
25.	Cucu Samsiah, A.md	Pranata Komputer Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Pejabat Penghubung
26.	Catur Setya Nugroho, SH	Pengolah Data Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
27.	Wahyu Dibyadi	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Pejabat Penghubung
28.	Agustin Nurcahyanti, SE	Kasubid Penyuluhan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Pejabat Penghubung
29.	Agung Wahyono	Pengurus dan Pengelola Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Pejabat Penghubung
30.	Pontjo Sulistyorini, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Pejabat Penghubung

f r dg

1	2	3	4
31.	Krisniati, SE	Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	Pejabat Penghubung
32.	Terania A, S.Sos	Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Candisari Kota Semarang	Pejabat Penghubung
33.	Kurnia Bakti R, S.Kom	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang	Pejabat Penghubung
34.	Pipien Hermawati, SH	Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang	Pejabat Penghubung
35.	Muzaro'ah, SE	Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Genuk Kota Semarang	Pejabat Penghubung
36.	Mutmainah, SE	Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Pejabat Penghubung
37.	Eko Prasetyadi	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Mijen Kota Semarang	Pejabat Penghubung
38.	Pratama Nandra Muliawan	Pengelola Program dan Kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
39.	Yuniarti Anies, SE	Penata Laporan Keuangan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
40.	Tintin Mariyana, S.H,M.H	Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang	Pejabat Penghubung
41.	Irina Hendriwati, SE	Kasi Pemerintahan dan Pembangunan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang	Pejabat Penghubung
42.	Prasetyo	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang	Pejabat Penghubung
43.	Dra. Christiarsih	Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang	Pejabat Penghubung

f x d g

1	2	3	4
44.	Tri Hardjono, S.Sos, MM	Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang	Pejabat Penghubung
45.	Drs. A. Edy Maksudi	Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Pejabat Penghubung
46.	Resty Martyawati, A.Md	Pengelola Program dan Kegiatan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang	Pejabat Penghubung
47.	Ety Kurniasari, SE.AKt	Ka Bag. Keuangan dan Akutansi pada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera	Pejabat Penghubung
48.	Acti Evan Anthadona	Manager Keuangan Personalia dan Operasional pada PT Taman Satwa	Pejabat Penghubung
49.	A Haryanto HW	Kasubid Umum dan Kesekretariatan pada BPR BKK Kota Semarang	Pejabat Penghubung
50.	Helmy Luhur Pribadi, SE	Kabag Operasional pada PD. BANK PASAR Kota Semarang	Pejabat Penghubung
51.	Sari Septiyaningtias K, S.Kom	Staff Sub. Bag Humas & Protokol pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang	Pejabat Penghubung
52.	Anggun Budi Pramono, S.sos	Pengolah data pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
53.	Heri Priharyanto, SE	Pengelola Surat pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
54.	Mudia Setyaningsih	Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
55.	Alif Hidayatullah, S.STP., M.Si	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
56.	Irmawati, SE	Analisis Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
57.	Heribertus Setyowirawan	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung

1	2	3	4
58.	Heru Kamdani, S.Ag	Pengadministrasi Kepegawaian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
59.	Stephanus Teguh Herry, ST	Pengolah Data pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
60.	Suyamto, SE	Pengelola Informasi Kerjasama pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
61.	Wulan Asih Setyarini, S.Sos	Penerjemah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
62.	Dian Anggraini, SE	Pranata Humas pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
63.	Yasmo	Tenaga Administrasi pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Pejabat Penghubung
64.	Novi Tri Suryani, Amd	Pranata Komputer pada Sekretariat DPRD Kota Semarang	Pejabat Penghubung
65.	R. Agung Riyanto, S.Kom	Pranata Komputer pada Inspektorat Kota Semarang	Pejabat Penghubung
66.	Gunawan Heruwibowo, ST	Pengadministrasi Umum pada RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	Pejabat Penghubung

  
 WALIKOTA SEMARANG,  
 HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR                      TAHUN  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN  
LAPORHENDI

TUGAS TIM PENGELOLAAN PENGADUAN LAPORHENDI

1. Pembina
  - a. pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Semarang yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
  - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Semarang.
2. Penanggungjawab
  - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Pengelolaan Pengaduan LaporanHendi;
  - b. melakukan penyelesaian pengaduan di Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.
3. Ketua
  - a. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan.
4. Wakil Ketua
  - a. membantu tugas Ketua untuk memimpin Admin Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)
  - b. membantu tugas Ketua mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Admin Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)
5. Sekretaris
  - a. mengkoordinasikan tugas-tugas Admin Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)
  - b. memberikan rekomendasi/disposisi kepada OPD dan/atau BUMD yang berkaitan pengaduan masyarakat
  - c. menyiapkan bahan memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan LaporanHendi
  - d. melaksanakan pelaporan tugas Admin Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)
6. Anggota
  - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
  - b. melaksanakan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
  - c. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab;
  - d. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Ketua.

h  
Q

7. Admin Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)
  - a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPORI-SP4N di tingkat Nasional untuk ditindaklanjuti;
  - b. meneruskan pengaduan kepada Pejabat Penghubung Perangkat Daerah dan /atau BUMD untuk ditindaklanjuti;
  - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Perangkat Daerah dan /atau BUMD;
  - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala setiap 3 bulan sekali meliputi jumlah pengaduan yang diterima, Perangkat Daerah dan/atau BUMD teradu pengaduan yang diselesaikan, dan pengaduan yang tidak terselesaikan, menindaklanjuti penyaluran pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPORI- SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
8. Pejabat Penghubung LaporanHendi
  - a. melaporkan pengaduan yang diterima langsung dan atau melalui P3M kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau BUMD untuk ditindaklanjuti;
  - b. menyampaikan pengaduan langsung yang diterima Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan hasil penyelesaian pengaduan kepada P3M;
  - c. memberikan informasi perkembangan penyelesaian pengaduan paling lama 10 hari kerja sejak pengaduan diterima Perangkat Daerah dan/atau BUMD;dan
  - d. menginput jawaban Perangkat Daerah dan/atau BUMD atas pengaduan yang disampaikan melalui P3M.

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

K